

TESIS

**KESENJANGAN PASAL 440 UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN
PASAL 360 KUHP DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TENAGA KESEHATAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Pid/2025)

***THE DISCREPANCY BETWEEN ARTICLE 440 OF THE HEALTH LAW
AND ARTICLE 360 OF THE CRIMINAL CODE IN THE CRIMINAL
LIABILITY OF HEALTH WORKERS***

(A Case Study of the Supreme Court Decision Number 1241 K/Pid/2025)



Oleh:

MARYANTO

NIM. 2410622060

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

TESIS

**KESENJANGAN PASAL 440 UNDANG-UNDANG
KESEHATAN DAN PASAL 360 KUHP DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Pid/2025)**

***THE DISCREPANCY BETWEEN ARTICLE 440 OF THE
HEALTH LAW AND ARTICLE 360 OF THE CRIMINAL CODE
IN THE CRIMINAL LIABILITY OF HEALTH WORKERS
(A Case Study of the Supreme Court Decision Number 1241
K/Pid/2025)***



Oleh:

MARYANTO

NIM. 2410622060

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

HALAMAN JUDUL

KESenjangan PASAL 440 UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN PASAL 360 KUHP DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Pid/2025)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

MARYANTO

NIM. 2410622060

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KESENJANGAN PASAL 440 UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN
PASAL 360 KUHP DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TENAGA KESEHATAN**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Pid/2025)

Disusun dan diajukan oleh:

MARYANTO
NIM. 2410622060

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal 9 Juli 2026

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. dr. Abdul Kolib, S.H., M.H.
NIP. 197808192010011009

Pembimbing 2



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,
S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., DipFS
NIP. 199304282022031009



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904

Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**KESENJANGAN PASAL 440 UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN
PASAL 360 KUHP DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TENAGA KESEHATAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Pid/2025)

Disusun dan diajukan oleh:

MARYANTO

NIM. 2410622060

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas

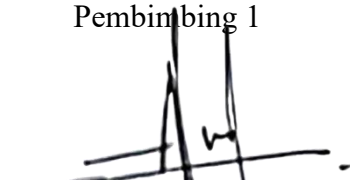
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Pada Tanggal 9 Juli 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

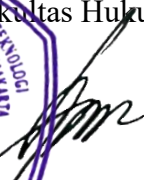

Dr. dr. Abdul Kolib, S.H., M.H.
NIP. 197808192010011009

Pembimbing 2


Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,
S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., DipFS
NIP. 199304282022031009

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Saherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi
Magister Hukum



Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H.,
M.H.
NIP. 198910192025211048

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Maryanto
NIM : 2410622060
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“KESENJANGAN PASAL 440 UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN PASAL 360 KUHP DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Pid/2025)”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'F14BAAOX060972129'.

Maryanto
NIM. 2410622060

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryanto
NIM : 2410622060
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KESENJANGAN PASAL 440 UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN PASAL 360 KUHP DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Pid/2025)”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'F14BAAOX060972129'.

Maryanto

NIM. 2410622060

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis hukum ini dengan judul **“KESENJANGAN PASAL 440 UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN PASAL 360 KUHP DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Pid/2025)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian tesis hukum ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat, serta doa yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang terhormat ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di lingkungan kampus yang penuh dengan nilai-nilai kebangsaan dan integritas akademik.
2. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Dekan yang telah memberikan arahan kebijakan akademik dan dukungan kelembagaan selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Hukum.
3. Bapak Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan kemudahan administratif dan akademik kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini berlangsung.

4. Bapak Dr. dr. Abdul Kolib, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran, kecermatan, dan dedikasi telah meluangkan waktu serta pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan, masukan substansial, dan arahan akademik yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan karya ilmiah ini.
5. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.,M.Tr.Adm.Kes., DipFS. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan koreksi, saran, dan bimbingan teknis yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini sehingga menjadi lebih baik dan layak untuk dipertanggungjawabkan secara akademik.
6. Seluruh Dosen pengajar di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah dengan tulus dan penuh dedikasi mentransfer ilmu, wawasan, dan nilai-nilai keilmuan hukum kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh Staf dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan pelayanan administratif dan kemudahan birokrasi selama penulis menempuh studi.
8. Istri/Orang tua dan seluruh keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa yang tiada putus, dukungan moril dan materiil, serta motivasi yang menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.
9. Seluruh rekan mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah menjadi teman diskusi, berbagi gagasan, serta memberikan semangat kebersamaan selama menempuh perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari berbagai kekurangan, baik dari sisi substansi, metodologi, maupun teknis penulisan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan tesis ini di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap agar tesis hukum ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti, baik bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, bagi para praktisi hukum, pembentuk kebijakan, maupun bagi masyarakat luas yang berkepentingan dengan kepastian hukum dalam bidang pelayanan kesehatan.

Jakarta, Juli 2026

Penulis

Maryanto

ABSTRAK

KESENJANGAN PASAL 440 UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN PASAL 360 KUHP DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Pid/2025)

Maryanto (2410622060), Abdul Kolib, Handar Subhandi Bakhtiar

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur Pasal 440 ayat (1) sebagai norma khusus (*lex specialis*) untuk pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan atas kelalaian medis yang mengakibatkan luka berat. Pasal ini mengancam pidana penjara paling lama 3 tahun. Namun, pengadilan dalam praktiknya justru mengesampingkan ketentuan tersebut. Pengadilan konsisten menerapkan Pasal 360 ayat (1) KUHP sebagai norma umum dengan ancaman pidana lebih berat, yaitu 5 tahun. Kondisi ini menciptakan kesenjangan normatif antara *das sollen* dan *das sein*. Kesenjangan tersebut mengancam kepastian hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Penelitian ini menganalisis pengaturan status dan kewenangan tenaga kesehatan dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini juga menganalisis kesenjangan normatif dalam penerapan Pasal 440 UU Kesehatan beserta faktor penyebabnya. Penelitian menggunakan tipe yuridis sosiologis bersifat deskriptif analitis. Penelitian mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Pid/2025. Kasus ini melibatkan perawat tanpa STR dan SIP yang melakukan sunat di luar fasilitas resmi dan mengakibatkan cacat permanen pada anak korban berusia 4 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan di semua tingkatan, dari Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Tinggi Bandung, hingga Mahkamah Agung, mengabaikan Pasal 440 UU Kesehatan tanpa argumentasi normatif memadai. Pengadilan bahkan menyimpangi tuntutan jaksa yang telah tepat menuntut berdasarkan Pasal 440. Temuan ini mengindikasikan adanya *conflict of norms*, *overlapping norms*, dan *vague norm*. Masalah ini diperparah oleh tidak berjalannya mekanisme Majelis Disiplin Profesi sesuai Pasal 304 dan 310 UU Kesehatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis. Pedoman ini akan menegaskan kriteria penerapan Pasal 440 sebagai *lex specialis* yang wajib diutamakan dalam perkara kelalaian medis.

Kata Kunci: Kesenjangan Normatif; Kelalaian Medis; Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan.

ABSTRACT

THE DISCREPANCY BETWEEN ARTICLE 440 OF THE HEALTH LAW AND ARTICLE 360 OF THE CRIMINAL CODE IN THE CRIMINAL LIABILITY OF HEALTH WORKERS

(A Case Study of the Supreme Court Decision Number 1241 K/Pid/2025)

Maryanto (2410622060), Abdul Kolib, Handar Subhandi Bakhtiar

Law Number 17 of 2023 on Health regulates Article 440 paragraph (1) as a special norm (lex specialis) for the criminal liability of health workers for medical negligence resulting in serious injury. This article threatens imprisonment for a maximum of 3 years. However, courts in practice set aside this provision. Courts consistently apply Article 360 paragraph (1) of the Criminal Code as a general norm with a heavier penalty threat of 5 years. This condition creates a normative gap between das sollen and das sein. This gap threatens legal certainty for both health workers and patients. This research analyzes the regulation of the status and authority of health workers in the Indonesian legal system and its implications for criminal liability. This research also analyzes the normative gap in the application of Article 440 of the Health Law and its causal factors. The research uses a sociological juridical type with descriptive analytical characteristics. The research integrates statutory, conceptual, and case study approaches through Supreme Court Decision Number 1241 K/Pid/2025. This case involves a nurse without STR and SIP credentials who performed circumcision outside official facilities, resulting in permanent disability to a 4 year old child victim. The analysis results show that courts at all levels, from Cibirong District Court, Bandung High Court, to the Supreme Court, disregarded Article 440 of the Health Law without adequate normative argumentation. Courts even deviated from the prosecutor's charges, which had correctly invoked Article 440. These findings indicate the presence of conflict of norms, overlapping norms, and vague norms. This problem is worsened by the non functioning mechanism of the Professional Disciplinary Council as mandated by Articles 304 and 310 of the Health Law. This research concludes that lawmakers and the Supreme Court need to develop technical guidelines. These guidelines should affirm the criteria for applying Article 440 as a lex specialis that must be prioritized in medical negligence cases.

Keywords: Normative Gap; Medical Negligence; Criminal Liability of Health Workers.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kajian Teoritis	21
1. Kajian Teori	21
a. Teori Pertanggungjawaban Pidana	21
b. Teori Hierarki Norma & Lex Specialis.....	25
c. Teori Kepastian Hukum	31
2. Kajian Konseptual	35
a. Tinjauan Umum Tenaga Kesehatan	35
b. Tinjauan Umum Kelalaian Medis.....	40
c. Tinjauan Umum Standar Pelayanan Kesehatan dan Tuntutan Hukum.....	47
B. Kerangka Pikir	54

C. Definisi Operasional	56
BAB III.....	69
METODE PENELITIAN	69
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	69
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	70
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	73
D. Analisis Bahan Hukum	74
BAB IV	76
HASIL DAN PEMBAHASAN	76
A. Pengaturan Penetapan Status dan Kewenangan Tenaga Kesehatan dalam Sistem Hukum Indonesia serta Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana.....	76
B. Analisis Kesenjangan Normatif dalam Penerapan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan oleh Pengadilan dalam Perkara Kelalaian Medis dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya	98
BAB V.....	131
PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134